

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 (AUDITED)



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SURABAYA
(UAKPA)**

Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2021

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Surabaya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surabaya, 13 Mei 2022

Kepala kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Andy Pardede



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5-6
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11-22
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23-27
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28-37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	38-43
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	43-45
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SURABAYA**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA SURABAYA I, JALAN INDRAPURA NO. 05 Lantai 5 SURABAYA 60178
TELEPON (031) 3573953; FAKSIMILE (031) 3554794; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Surabaya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Tahun Anggaran 2021 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, 13 Mei 2022

Kepala kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Andy Pardede



Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Surabaya (Audited) Tahun Anggaran 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.49.801.459.021 atau mencapai 68 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp72.756.134.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp.1.938.146.356 atau mencapai 96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.026.487.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp.20.542.296.769 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.19.653.492.036, Aset Tetap (netto) sebesar Rp888.804.733, dan tidak ada Piutang Jangka Panjang.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp19.593.662.578 dan Rp948.634.191.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp47.683.977.194, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.111.369.827, sehingga terdapat Surplus dari

Kegiatan Operasional senilai Rp47.683.977.194. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp52.600.000 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp47.683.977.194.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp1.128.955.504 ditambah Surplus-LO sebesar Rp47.683.977.194 kemudian dikurangi Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi senilai Rp985.851 dan ditambah koreksi-koreksi senilai 0 serta ditambah Lain-lain sebesar Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp47.863.312.656, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp948.634.191.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SURABAYA**
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 2020
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021		% thd Angg	31 Desember 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	72,756,134,000	49,742,747,021	68.37	39,950,071,232
JUMLAH PENDAPATAN		72,756,134,000	49,742,747,021	68.37	39,950,071,232
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0.00	2,102,360,643
Belanja Barang	B.4	1,877,203,000	1,801,832,365	95.98	1,958,943,904
Belanja Modal	B.5	149,284,000	136,314,000	91.31	17,294,000
JUMLAH BELANJA		2,026,487,000	1,938,146,365	95.64	4,078,598,547

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA NERACA

PER 31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	6,112,000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	19,587,580,398	11,297,411,759
Persediaan	C.4	65,911,638	225,040,667
Jumlah Aset Lancar		19,653,492,036	11,528,564,426
ASET TETAP			
Tanah	C.5	210,600,000	210,600,000
Peralatan dan Mesin	C.6	4,704,003,469	4,593,397,469
Gedung dan Bangunan	C.7	419,314,675	393,606,675
Aset Tetap Lainnya	C.8	3,148,860	3,148,860
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(4,448,262,271)	(4,299,438,026)
Jumlah Aset Tetap		888,804,733	901,314,978
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan		-	-
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		-	-
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain		-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya		-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		20,542,296,769	12,429,879,404
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	19,593,662,578	1,987,529,736
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.11	-	-
Utang Muka dari KPPN	C.12	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.13	-	9,313,394,164
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		19,593,662,578	11,300,923,900
JUMLAH KEWAJIBAN		19,593,662,578	11,300,923,900
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	948,634,191	1,128,955,504
JUMLAH EKUITAS		948,634,191	1,128,955,504
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		20,542,296,769	12,429,879,404

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SURABAYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	49,742,747,021	39,948,748,232
JUMLAH PENDAPATAN		49,742,747,021	39,948,748,232
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	2,102,360,643
Beban Persediaan	D.3	271,379,879	358,137,926
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,083,966,950	874,315,862
Beban Pemeliharaan	D.5	80,266,257	99,058,310
Beban Perjalanan Dinas	D.6	527,918,347	847,554,974
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	147,838,394	115,046,958
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	-	-
JUMLAH BEBAN		2,111,369,827	4,396,474,673
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		47,631,377,194	35,552,273,559
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	52,600,000	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	-	5,315,850
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		52,600,000	5,315,850
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		47,683,977,194	35,557,589,409
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		47,683,977,194	35,557,589,409

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	1,128,955,504	1,256,964,024
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	47,683,977,194	35,557,589,409
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	(985,851)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	(985,851)	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	-
JUMLAH		(985,851)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(47,863,312,656)	(35,685,597,929)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(180,321,313)	(128,008,520)
EKUITAS AKHIR	E.5	948,634,191	1,128,955,504

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Entitas berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Surabaya I Jalan Indrapura Nomor 05 Surabaya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya berkomitmen dengan visi **“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.

- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan (Audited) Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam

mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul

hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat	100%

	Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	72,756,134,000	-
Jumlah Pendapatan	72,756,134,000	-
Belanja		
Belanja Pegawai	0	-
Belanja Barang	2,243,431,000	1,801,832,365
Belanja Modal	153,343,000	136,314,000
Jumlah Belanja	2,396,774,000	1,938,146,365

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp49.801.459.021

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp49.801.459.021 atau mencapai 68 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp72.756.134.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya terdiri dari

Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	72,756,134,000	49,801,459,021	68.45
Jumlah	72,756,134,000	49,801,459,021	-

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 168 persen dibandingkan TA 2020.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
(Audited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	2021	2020	NAIK %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	49,801,459,021	39,950,071,232	24.66
Jumlah	49,801,459,021	39,950,071,232	24.66

B.2 Belanja

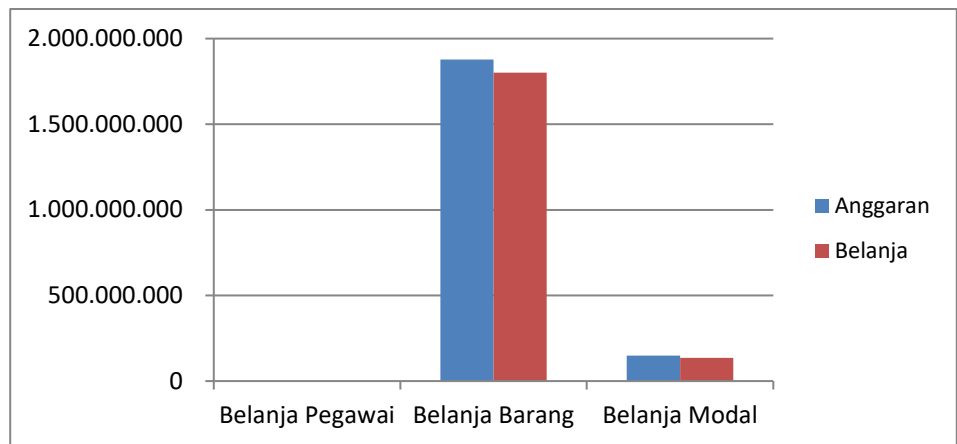
*Realisasi
Belanja Negara
Rp1.938.146.36
5*

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp1.938.146.365 atau 96 persen dari anggaran belanja sebesar Rp2.026.487.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
(Audited) TA 2021*

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	-	-
Belanja Barang	1,877,203,000	1,801,832,365	95.98
Belanja Modal	149,284,000	136,314,000	91.31
Jumlah	2,026,487,000	1,938,146,365	95.64

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafikberikutini



Dibandingkan dengan (Audited) TA 2020, Realisasi Belanja (Audited) TA 2021 mengalami penurunan sebesar 77,03 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya adanya mutasi pegawai dan adanya pandemic Covid-19 sehingga banyak agenda perjalan dinas tidak terlaksana serta pemakaian kendaraan dinas juga berkurang.

*Perbandingan Realisasi Belanja
Semester I TA 2021 dan 2020*

URAIAN	2021	2020	NAIK %
Belanja Pegawai	-	2,102,360,643	-
Belanja Barang	1,801,832,365	1,958,943,904	(8.02)
Belanja Modal	136,314,000	17,294,000	688.22
Jumlah	1,938,146,365	4,078,598,547	(52.48)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai (Audited) TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan 0. Belanja Pegawai adalah

Rp0

belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 0 persen dari TA 2020.

*Perbandingan Belanja Pegawai
(Audited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	1.349.123.474	(100,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	4.299.000	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	1.353.422.474	(100,00)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	0	1.353.422.474	(100,00)

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang

Rp1.801.832.365

Realisasi Belanja Barang (Audited) TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.801.832.365 dan Rp1.958.943.904. Realisasi Belanja Barang (Unaudited) TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 69 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2020.

*Perbandingan Belanja Barang
periode 31 Desember 2021 dan 2020*

Uraian	2021	2020	Naik / (Turun) %
Belanja Barang Operasional	848,660,985	756,293,793	12.21
Belanja Barang Non Operasional	223,646,500	36,275,500	516.52
Belanja Barang Persediaan	112,250,850	141,526,899	(20.69)
Belanja Jasa	25,668,752	78,234,428	(67.19)
Belanja Pemeliharaan	111,928,402	99,058,310	12.99
Belanja Perjalanan Dinas	479,676,876	847,554,974	(43.40)
Realisasi Belanja Bruto	1,801,832,365	1,958,943,904	(8.02)
<i>Pengembalian Belanja</i>	-		
Realisasi Belanja Netto	1,801,832,365	1,958,943,904	(8.02)

Terdapat alokasi belanja terkait penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp72.338.000 yang telah terserap sebesar Rp64.706.463 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan pandemi COVID-19	62,370,000	61,561,463	99%
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	9,968,000	3,145,000	32%
	Jumlah	72,338,000	64,706,463	89.45%

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp136.314.000

Realisasi Belanja Modal (Audited) TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp136.314.000 dan Rp17.294.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal (Audited) pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 99 persen dibandingkan TA 2020 hal ini disebabkan pada TA 2021 anggaran Belanja Modal hanya

untuk pembelian infokus dan printer saja.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Semester II TA 2021 dan 2020*

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110,606,000	17,294,000	539.56
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25,708,000	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	136,314,000	17,294,000	688.22
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	136,314,000	17,294,000	688.22

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Periode Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020*

Keterangan	2021	30-Jun-20
Uang Tunai	-	-
Bank Mandiri	-	-
Kuitansi UP yang belum di SPM GU kan	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak
Rp0*

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2021 dan 2020

No	Nama	2021	2020
	TP/TGR	-	-
Jumlah		-	-

C.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR

*Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Lancar
Rp0*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Semester II TA
2021 dan 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.5 Persediaan

Persediaan
Rp.65.911.638

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.65.911.638 dan Rp.225.040.667. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada *masyarakat*. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	31-Dec-21	31-Dec-20
Barang Konsumsi	65,911,638	225,040,667
Jumlah	65,911,638	225,040,667

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.6 Tanah

Tanah

Rp210.600.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp210.600.000 dan Rp210.600.000. Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang atas aset tanah ini di Tahun 2021. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 September 2021	210.600.000
Mutasi tambah:	
	0
Mutasi kurang:	
	0
Saldo per 30 September 2021	210.600.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	300	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	210.600.000
2	-	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	-
3	-	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-
Jumlah			210.600.000

C.7 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Rp. 4.704.003.469

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 4.704.003.469 dan Rp.4.593.397.469. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	4,704,003,469
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2021	4,704,003,469
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	0
Nilai Buku per 31 Desember 2021	4,704,003,469

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Penambahan dari Pembelian 1 unit Televisi senilai Rp5.750.000.
- Penambahan dari Pembelian 3 unit printer senilai Rp7.872.000
- Penambahan dari pembelian 2 unit Scanner senilai Rp25.654.000

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.8 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp419.314.675*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp419.314.675 dan Rp393.606.675 Mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	393,606,675
Mutasi tambah:	
	25,708,000
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2021	419,314,675
Akumulasi Penambahan s.d. 31 Desember 2021	
Nilai Buku per 31 Desember 2021	419,314,675

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.9 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi kurang:	-
31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.10 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp3.148.860*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp3.148.860 dan Rp3.148.860.

Aset tetap tersebut berupa buku perpustakaan. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk periode 30 September 2020.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp4.448.262.271)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing (Rp4.448.262.271) dan (Rp4.299.438.029)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk

Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	210,600,000	210,600,000	0
2	Peralatan dan Mesin	4,704,003,469	4,593,397,469	110,606,000
3	Gedung dan Bangunan	419,314,675	393,606,675	25,708,000
4	Aset Tetap Lainnya	3,148,860	3,148,860	0
Akumulasi Penyusutan		(4,448,262,271)	(4,299,438,026)	(148,824,245)

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.12 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp0

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 30 September 2020 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp19.587.580.398*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp19.587.580.398 dan Rp1.984.017.595. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

C.15 Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp0*

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp9,313,394,164.

C.16 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari KPPN
Rp0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0 dan Rp0

C.17 Ekuitas

*Ekuitas
Rp1.128.955.504*

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.128.955.504 dan Rp1.256.964.024. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan

PNBP

Rp49.801.459.02

1

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp49.801.459.021 dan Rp39.950.071.232. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Periode 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	52,600,000	-	
Pendapatan Biad PPN	195,130,034	143,678,526	35.81%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	4,596,075	-100.00%
Pendapatan Jasa Lainnya	500,000	1,000,000	-50.00%
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	6,397,088,986	2,281,802,538	180.35%
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	43,116,051,947	37,420,851,155	15.22%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	40,085,654	90,707,938	-55.81%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu	-	7,435,000	-100.00%
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak	2,400	-	#DIV/0!
Jumlah	49,801,459,021	39,950,071,232	24.66%

Pendapatan berasal dari Sewa rumah bangunan dan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I, BIAD PPN, dan Bea Lelang dari PT. Pegadaian.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp0 Jumlah Beban Pegawai pada periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.102.360.643

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Periode 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	1.526.628.342	(100,00)
Beban Tunjangan-Tunjangan PNS	0	571.405.301	(100,00)
Beban Uang Lembur	0	4.299.000	(100,00)
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	28.000	(100,00)
Jumlah	0	2.102.360.643	(100,00)

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp271.379.879 Jumlah Beban Persediaan pada Periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp271.379.879 dan Rp 358.137.926 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	271,379,879	358,137,926	(24.22)
Jumlah Beban Persediaan	271,379,879	358,137,926	(24.22)

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp1.083.966.950*

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.083.966.950 dan Rp874.315.862. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
Periode 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	851,009,135	756,293,793	12.52
Beban Barang Non Operasional	208,421,500	36,275,500	474.55
beban Langganan Daya dan Jasa	104,932,572	78,234,428	34.13
Beban Persediaan Konsumsi		141,526,899	0.00
Beban Perjalanan Dinas	527,918,347	847,554,974	0.00
Beban Jasa Lainnya	0	99,058,310	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunandan Mesin	0	0	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya dan Bangunandan Mesin	0	0	#DIV/0!
Jumlah	1,692,281,554	1,958,943,904	(13.61)

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp80.266.256*

Beban Pemeliharaan periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp80.266.256 dan Rp99.058.310. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan periode 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80,266,257	99,058,310	(18.97)
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0.00
Jumlah	80,266,257	99,058,310	(18.97)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp
Rp527.918.347*

Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp527.918.347 dan Rp847.554.974. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
Periode 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	379,093,847	745,394,974	(49.14)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	148,824,500	102,160,000	45.68
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	
Jumlah	527,918,347	847,554,974	(37.71)

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp147.838.394 . Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp147.838.394 dan Rp115.046.958. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	139,141,762	106,649,256	30.47
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8,696,632	8,397,702	3.56
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi	-	-	
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	147,838,394	115,046,958	28.50

D.8 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp(300.000) Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Semester I TA 2021 dan 2020 sebesar Rp(300.000) dan Rp7.165.000 Rincian Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
(Audited) TA 2021 dan 2020*

URAIAN	2021	2020	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(300.000)	7.165.000	(104,19)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	7.435.000	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	300.000	270.000	11,11
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(300.000)	7.165.000	(104,19)

D.9 Pos Luar Biasa

*Pos Luar Biasa
Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp1.128.955.504*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.128.955.504 dan Rp1.256.964.024

E.2 Surplus /Defisit LO

*Surplus/Defisit
LO
Rp47.683.977.194*

Jumlah Surplus / Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp47.683.977.194 dan Rp35.557.589.409. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian
Nilai Aset Rp0*

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset

*Selisih
Revaluasi Aset
Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan 0

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp(985.851)*

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(985.851) dan Rp.0

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

*Koreksi Lain-
Lain Rp.0*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Koreksi	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp(47.863.312.656
)*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(47.863.312.656) dan Rp(35.685.597.929) Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	47,683,977,194
Ditagihkan ke Entitas Lain	
Transfer Masuk	985,851
Jumlah	47,684,963,045

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp0

E.5 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp948.634.191*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp948.634.191 dan Rp1.128.955.504.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada.